E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 4974-4990
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Pendamping Penggunaan Qris Metode Pembayaran Tunai Di Tengah Transformasi Digital Di Desa Merek

Putri Chairunnisa Pane[1], Ammalia Shelky Nakwa Jamalika Putri[2], Nazwa Alya Putri[3], Meyla Dwi Bastina[4], Budi Sastra Panjaitan[5]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam[12345]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara[12345]
e-mail: putrichairunnisa1313@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang pesat telah dijadikan Bank Indonesia sebagai instrumen utama akselerasi masyarakat nontunai (cashless society), namun uang tunai masih menjadi alat transaksi utama di banyak wilayah pedesaan. Penelitian ini mengkaji fenomena bertahannya preferensi pembayaran tunai di tengah ketersediaan QRIS pada masyarakat Desa Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), warga desa, dan perangkat desa, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi tunai terutama didorong oleh kekhawatiran menjadi korban penipuan dan minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme transaksi QRIS, di samping rendahnya literasi digital dan keuangan, kurangnya kepercayaan terhadap teknologi pembayaran yang belum familiar, keterbatasan infrastruktur sinyal, serta kebiasaan budaya yang lebih menyukai transaksi tunai secara tatap muka. Sebagai respons atas hambatan tersebut, tim KKN merancang dan menyelenggarakan seminar anti-scam dan penipuan digital agar warga lebih memahami cara berdigitalisasi yang aman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi pembayaran digital di masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kepercayaan dan edukasi literasi yang berkelanjutan, serta merekomendasikan kolaborasi edukasi yang konsisten antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah desa, dan perguruan tinggi.

Kata Kunci: preferensi tunai, transformasi digital, QRIS, literasi keuangan, penipuan digital, masyarakat desa.

Abstract

The rapid growth of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has been positioned by Bank Indonesia as the main instrument for accelerating a cashless society, yet cash remains the dominant instrument of everyday transactions in many rural areas. This study examines the persistence of cash preference amid the availability of QRIS in Desa Merek, Kabupaten Karo, North Sumatra, using a qualitative descriptive approach carried out during a community service program (Kuliah Kerja Nyata/KKN). Data were collected through in-depth interviews with micro, small, and medium enterprise (UMKM) operators, village residents, and village officials, complemented by field observation and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that cash preference is primarily driven by the fear of fraud and an inadequate understanding of the QRIS transaction mechanism among UMKM actors, alongside limited digital and financial literacy, distrust toward unfamiliar payment technology, weak signal infrastructure, and habitual cultural practices that favor face-to-face cash exchange. In response to these barriers, the KKN team designed and delivered an anti-scam and digital-fraud-awareness seminar to help residents understand safer digitalization practices. The study concludes that digital payment adoption in rural communities cannot be separated from trust-building and continuous literacy efforts, and recommends collaborative, sustained education involving Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), village government, and higher education institutions.

Keywords: cash preference, digital transformation, QRIS, financial literacy, digital fraud, rural community.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah wajah sistem pembayaran di Indonesia secara mendasar. Sejak Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019 sebagai standar kode QR nasional yang menyatukan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, transaksi nontunai berbasis kode QR tumbuh sangat pesat. Data Bank

Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna QRIS meningkat dari sekitar 25,4 juta merchant pada April 2023 menjadi lebih dari 35,9 juta merchant dan 55,4 juta pengguna pada akhir 2024, dengan mayoritas merchant merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Bank Indonesia, 2024). Pertumbuhan ini menempatkan QRIS sebagai salah satu instrumen utama percepatan ekonomi dan keuangan digital nasional sekaligus wujud nyata dari agenda inklusi keuangan yang didorong pemerintah.

Meskipun demikian, percepatan digitalisasi pembayaran secara nasional tidak selalu berjalan merata hingga ke tingkat desa. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen (OJK & BPS, 2024). Kesenjangan antara indeks literasi dan indeks inklusi tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan keuangan digital, termasuk QRIS, telah cukup luas tersedia, tetapi belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai cara kerja, manfaat, dan risiko penggunaannya, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat edukasi keuangan.

Fenomena tersebut terlihat jelas di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tim penulis. Desa ini merupakan kawasan agraris dataran tinggi dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan hasil bumi, dan usaha mikro seperti warung, kios, dan pedagang pasar tradisional. Meskipun sinyal telekomunikasi dan layanan perbankan digital secara bertahap telah menjangkau desa ini dan sejumlah pelaku usaha telah memiliki barcode QRIS, praktik transaksi sehari-hari masyarakat masih sangat didominasi oleh uang tunai. Observasi awal tim KKN menemukan bahwa sebagian pedagang justru merasa lebih aman dan lebih mudah menerima uang kertas dan uang koin secara langsung dibandingkan menerima pembayaran melalui pindai kode QR, meskipun perangkat dan fasilitas untuk itu sesungguhnya tersedia.

Kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan tingkat pemanfaatannya ini menarik untuk dikaji secara mendalam, karena angka-angka pertumbuhan QRIS secara nasional tidak serta-merta menggambarkan bagaimana masyarakat pada level akar rumput memahami, menyikapi,

dan memutuskan untuk menggunakan atau menghindari transaksi digital. Ada dimensi psikologis, sosial, dan budaya yang tidak tertangkap oleh data statistik makro, namun sangat menentukan keberhasilan program digitalisasi pembayaran di tingkat desa. Salah satu temuan awal yang paling menonjol dari wawancara pendahuluan tim KKN dengan pelaku UMKM di Desa Merek adalah kekhawatiran akan tertipu atau menjadi korban penipuan digital, serta ketidakpahaman terhadap mekanisme teknis QRIS, seperti proses verifikasi pembayaran, notifikasi dana masuk, dan potensi biaya administrasi (Merchant Discount Rate/MDR).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab empat permasalahan utama, yaitu: pertama, mengapa masyarakat Desa Merek masih memilih bertransaksi secara tunai meskipun QRIS telah tersedia; kedua, bagaimana masyarakat memahami transformasi digital dalam aktivitas ekonomi keseharian mereka; ketiga, hambatan budaya, teknis, dan kepercayaan apa saja yang muncul dalam proses adopsi QRIS; dan keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk merespons hambatan tersebut. Sebagai bentuk kontribusi nyata program KKN, tim penulis merancang dan menyelenggarakan seminar anti-scam dan penipuan digital bagi warga desa sebagai salah satu luaran (output) dari penelitian ini, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara berdigitalisasi yang aman sehingga kepercayaan terhadap QRIS dan layanan keuangan digital lainnya dapat tumbuh secara bertahap.

Penelitian mengenai adopsi QRIS pada masyarakat maupun UMKM telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, namun sebagian besar berfokus pada wilayah perkotaan atau pada aspek peningkatan pendapatan UMKM setelah mengadopsi QRIS (Alifia, Permana, & Harnovinsah, 2024). Penelitian yang secara spesifik mengangkat persoalan mengapa masyarakat pedesaan justru bertahan pada preferensi tunai, serta bagaimana ketakutan akan penipuan digital menjadi penghambat utama, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman kontekstual mengenai psikologi dan budaya transaksi masyarakat desa, sekaligus kontribusi praktis berupa model edukasi anti-scam yang dapat direplikasi pada program pengabdian masyarakat di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis bagi pemerintah desa, Bank Indonesia, OJK, pelaku UMKM, mahasiswa, dan perguruan tinggi dalam merancang edukasi keuangan digital yang kontekstual serta pendampingan penggunaan QRIS.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif untuk memahami secara mendalam fenomena preferensi pembayaran tunai di tengah ketersediaan QRIS pada masyarakat Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif informan yang tidak dapat direduksi menjadi angka semata, sebagaimana relevan untuk mengkaji dimensi kepercayaan, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap transformasi digital. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian terdiri atas tiga kelompok utama: pertama, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti pemilik warung, kios kelontong, dan pedagang pasar yang telah maupun belum memiliki barcode QRIS; kedua, warga desa sebagai konsumen yang melakukan transaksi sehari-hari; dan ketiga, perangkat desa serta tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial-ekonomi desa secara umum. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu dihentikan pada saat informasi yang diperoleh dari informan baru tidak lagi memunculkan tema baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur yang dipandu oleh pedoman wawancara, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman secara terbuka. Kedua, observasi partisipatif, yaitu tim KKN turut mengamati dan terlibat langsung dalam aktivitas transaksi di pasar, warung, dan kegiatan ekonomi warga selama masa penempatan KKN. Ketiga, dokumentasi, berupa foto kegiatan, catatan lapangan (field notes), serta dokumen pendukung seperti data

jumlah merchant QRIS di wilayah desa yang diperoleh dari perangkat desa dan agen bank setempat.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) (dalam Sugiarti & Ramadhan, 2022). Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada tema-tema yang relevan dengan empat fokus penelitian, yaitu alasan bertahannya preferensi tunai, pemahaman masyarakat terhadap transformasi digital, hambatan budaya-teknis-kepercayaan, serta respons intervensi berupa seminar anti-scam.

Sebagai konteks lokasi penelitian, Desa Merek merupakan salah satu desa di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, yang berada pada dataran tinggi dengan mata pencaharian utama penduduk berupa pertanian hortikultura, peternakan skala rumah tangga, dan perdagangan hasil bumi di pasar tradisional mingguan. Aktivitas ekonomi warga banyak berpusat pada warung-warung kecil, kios kelontong, dan lapak pedagang musiman yang buka pada hari pasar. Karakteristik ini penting dipahami karena pola transaksi ekonomi di desa dengan struktur semacam ini cenderung bersifat informal, personal, dan berjangka pendek, berbeda dengan pola transaksi di wilayah perkotaan yang lebih formal dan berjangka panjang, sehingga turut membentuk preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran yang digunakan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari ketiga kelompok informan, dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada data sekunder resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembanding data makro terhadap temuan mikro di tingkat desa, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan konteks nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Masyarakat Desa Merek Masih Memilih Transaksi Tunai di Tengah Ketersediaan QRIS

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Merek menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas QRIS tidak serta-merta diikuti oleh kesediaan untuk menggunakannya secara aktif. Sebagian pedagang mengaku telah memiliki barcode QRIS melalui program perluasan merchant yang difasilitasi bank penyalur, namun barcode tersebut lebih banyak terpasang sebagai simbol modernitas usaha ketimbang digunakan secara fungsional dalam transaksi harian. Temuan ini sejalan dengan pola nasional di mana pertumbuhan jumlah merchant QRIS yang mencapai lebih dari 35 juta pada akhir 2024 tidak secara otomatis mencerminkan frekuensi penggunaan aktif pada level transaksi harian masyarakat, khususnya di wilayah dengan populasi UMKM mikro yang dominan (Bank Indonesia, 2024).

1. Ketakutan Menjadi Korban Penipuan (Fraud Anxiety)

Alasan yang paling sering dikemukakan oleh informan UMKM adalah kekhawatiran menjadi korban penipuan digital. Beberapa pedagang menyampaikan kekhawatiran bahwa pembeli dapat menunjukkan bukti pembayaran palsu, memperlihatkan tangkapan layar (screenshot) transaksi yang telah direkayasa, atau menggunakan aplikasi tiruan yang menampilkan notifikasi seolah-olah dana telah masuk padahal transaksi belum benar-benar berhasil. Ketakutan ini menjadi semakin besar karena sebagian pedagang tidak memiliki telepon pintar pribadi yang secara aktif memberikan notifikasi transaksi masuk secara real-time, sehingga mereka harus menunggu konfirmasi dari anggota keluarga atau memeriksa mutasi secara manual, yang dianggap merepotkan dan rawan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

Kekhawatiran semacam ini sejalan dengan temuan Maulida dan Rachman (2022) yang menyatakan bahwa persepsi risiko keamanan (perceived security risk) merupakan salah satu prediktor terkuat penolakan UMKM terhadap pembayaran digital, bahkan ketika risiko aktual dari sistem yang telah tersertifikasi Bank Indonesia relatif rendah. Fenomena ini menegaskan bahwa hambatan adopsi QRIS bukan semata soal ketersediaan infrastruktur, melainkan soal persepsi psikologis terhadap keamanan yang belum terbangun secara memadai.

2. Ketidakpahaman terhadap Mekanisme Teknis QRIS

Selain ketakutan akan penipuan, faktor kedua yang menonjol adalah minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme teknis penggunaan QRIS, mulai dari cara memindai kode, proses verifikasi pembayaran, jeda waktu masuknya dana, hingga adanya potensi biaya Merchant

Discount Rate (MDR) yang dibebankan oleh penyedia jasa pembayaran. Beberapa informan mengaku pernah mencoba menerima pembayaran QRIS namun merasa bingung ketika dana yang diterima tidak sesuai ekspektasi karena adanya potongan biaya administrasi, sehingga mereka memutuskan untuk kembali sepenuhnya pada transaksi tunai agar nominal yang diterima jelas dan utuh.

Kondisi ini konsisten dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,11 persen, jauh di bawah indeks inklusi keuangan syariah maupun indeks literasi keuangan konvensional (OJK & BPS, 2024). Rendahnya literasi ini semakin terasa di wilayah pedesaan yang minim akses terhadap program edukasi keuangan formal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan digital, termasuk QRIS, banyak diperoleh secara informal melalui cerita dari mulut ke mulut yang rentan bias dan tidak akurat.

3. Kenyamanan dan Kepastian Nilai Transaksi Tunai

Faktor ketiga adalah persepsi bahwa uang tunai memberikan kepastian nilai yang lebih tinggi dibandingkan transaksi digital. Informan menyatakan bahwa dengan menerima uang tunai, mereka dapat langsung menghitung, menyimpan, dan menggunakan uang tersebut tanpa perlu bergantung pada jaringan internet, aplikasi perbankan, maupun proses pencairan lebih lanjut. Bagi sebagian pedagang lanjut usia, uang tunai juga memiliki nilai psikologis sebagai bentuk transaksi yang dapat dirasakan secara fisik (tangible), berbeda dengan uang digital yang dianggap abstrak dan sulit dipercaya sepenuhnya.

B. Pemahaman Masyarakat terhadap Transformasi Digital dalam Keseharian

Meskipun preferensi transaksi tunai masih dominan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Desa Merek sesungguhnya tidak asing dengan istilah dan gambaran umum transformasi digital. Sebagian besar informan telah menggunakan telepon pintar untuk berkomunikasi melalui aplikasi perpesanan, mengakses media sosial, dan bahkan berbelanja daring (online) melalui aplikasi e-commerce untuk kebutuhan tertentu seperti pakaian atau perlengkapan pertanian. Artinya, transformasi digital secara umum telah menjadi bagian dari keseharian warga, namun penerimaannya sangat selektif dan terbatas pada aktivitas yang dianggap memiliki manfaat langsung dan risiko rendah.

Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi digital umum (general digital literacy) dan literasi keuangan digital (digital financial literacy). Warga yang terbiasa menggunakan aplikasi media sosial atau belanja daring belum tentu memahami cara kerja sistem pembayaran digital, karena keduanya menuntut jenis pemahaman dan tingkat kepercayaan yang berbeda. Transaksi keuangan melibatkan risiko finansial langsung yang dirasakan lebih berat dibandingkan risiko sosial dalam penggunaan media sosial, sehingga meskipun warga sudah 'melek digital' secara umum, adopsi pembayaran digital tetap tertinggal.

Wawancara dengan perangkat desa mengungkapkan bahwa generasi muda di Desa Merek, khususnya mereka yang pernah merantau atau menempuh pendidikan di kota, cenderung lebih terbuka dan aktif menggunakan QRIS maupun dompet digital, sementara generasi yang lebih tua dan kelompok yang jarang meninggalkan desa lebih memilih bertahan pada kebiasaan lama. Perbedaan generasi (generational gap) ini menjadi salah satu variabel penting yang membentuk peta pemahaman transformasi digital di tingkat desa, dan menjadi pertimbangan penting dalam merancang pendekatan edukasi yang sesuai untuk setiap kelompok usia.

Selain generasi, tingkat interaksi dengan lembaga keuangan formal juga memengaruhi pemahaman warga terhadap transformasi digital. Warga yang memiliki rekening bank dan pernah mengikuti sosialisasi dari petugas bank atau penyuluh koperasi menunjukkan pemahaman yang relatif lebih baik terhadap konsep transaksi nontunai, dibandingkan warga yang belum pernah bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan formal. Temuan ini menegaskan pentingnya peran intermediasi, baik oleh lembaga keuangan, mahasiswa KKN, maupun tokoh masyarakat, dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut.

C. Hambatan Budaya, Teknis, dan Kepercayaan dalam Adopsi QRIS

1. Hambatan Budaya

Secara budaya, masyarakat Desa Merek memiliki tradisi transaksi tatap muka yang kuat, di mana proses tawar-menawar, sapaan, dan interaksi personal antara penjual dan pembeli dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi sekaligus sosial. Transaksi tunai memungkinkan interaksi ini berlangsung secara utuh, sementara transaksi digital dianggap mengurangi kehangatan hubungan sosial tersebut karena prosesnya lebih cepat, sunyi, dan minim interaksi verbal. Nilai kekerabatan dan kepercayaan berbasis relasi personal (personal trust) yang

telah lama terbangun dalam masyarakat desa juga membuat warga lebih nyaman bertransaksi dengan pihak yang mereka kenal secara langsung dibandingkan dengan sistem yang dijalankan oleh pihak ketiga tak dikenal seperti penyedia jasa pembayaran digital.

Selain itu, budaya gotong royong dan kebiasaan menyimpan uang tunai sebagai bentuk kontrol pengeluaran rumah tangga (mental accounting) turut memengaruhi preferensi warga. Banyak informan, terutama ibu rumah tangga, menyatakan bahwa menyimpan dan mengeluarkan uang secara fisik membantu mereka mengontrol pengeluaran harian dengan lebih disiplin dibandingkan bertransaksi secara digital yang dirasa membuat pengeluaran menjadi kurang terasa (kurang terkontrol).

2. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang paling banyak diungkapkan informan adalah keterbatasan dan ketidakstabilan sinyal telekomunikasi di sejumlah titik wilayah Desa Merek yang berkontur perbukitan, sehingga proses pemindaian kode QR maupun verifikasi transaksi kerap terhambat. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM skala mikro belum memiliki telepon pintar dengan spesifikasi memadai atau paket data internet yang stabil, sehingga QRIS statis yang telah dicetak justru jarang dapat diverifikasi keberhasilannya secara langsung. Keterbatasan literasi digital dasar, seperti kesulitan mengoperasikan aplikasi perbankan atau memahami tampilan notifikasi transaksi, turut memperbesar hambatan teknis ini.

Hambatan teknis lain yang muncul adalah minimnya pendampingan pascapemasangan QRIS. Sejumlah pedagang mengaku hanya menerima barcode dari petugas bank tanpa mendapatkan pelatihan penggunaan secara memadai, sehingga ketika menghadapi kendala teknis di lapangan, seperti kode QR yang rusak atau tidak terbaca, mereka tidak mengetahui langkah penyelesaiannya dan cenderung meninggalkan penggunaan QRIS sama sekali.

3. Hambatan Kepercayaan (Trust)

Hambatan kepercayaan menjadi benang merah yang menghubungkan hambatan budaya dan teknis di atas. Rendahnya trust warga terhadap sistem pembayaran digital terbentuk dari kombinasi antara minimnya pemahaman teknis, pengalaman tidak langsung terhadap kasus penipuan yang beredar di media sosial, dan ketiadaan figur atau lembaga tepercaya yang secara konsisten mendampingi warga dalam proses transisi ke transaksi digital. Berbeda dengan

transaksi tunai yang risikonya dapat langsung diverifikasi secara fisik, transaksi digital menuntut kepercayaan terhadap sistem yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung, sehingga bagi masyarakat yang belum terbiasa, hal ini terasa sebagai lompatan kepercayaan (leap of faith) yang cukup besar.

Ketiga dimensi hambatan tersebut, yaitu budaya, teknis, dan kepercayaan, tidak berdiri sendiri melainkan saling memperkuat satu sama lain. Hambatan teknis memperbesar rasa tidak percaya, sementara nilai budaya yang menekankan interaksi personal membuat masyarakat cenderung mempertahankan cara transaksi lama sebagai zona nyaman. Kombinasi ini menjelaskan mengapa upaya perluasan merchant QRIS semata tidak cukup untuk mengubah perilaku transaksi masyarakat desa tanpa disertai program literasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

D. Upaya Mitigasi: Penyelenggaraan Seminar Anti-Scam dan Penipuan Digital sebagai Program KKN

Menindaklanjuti temuan bahwa ketakutan akan penipuan dan minimnya pemahaman menjadi hambatan utama adopsi QRIS, tim KKN Desa Merek merancang dan menyelenggarakan program seminar bertajuk "Seminar Anti-Scam dan Penipuan Digital: Digitalisasi yang Aman untuk Warga Desa Merek" sebagai bentuk intervensi sekaligus luaran praktis dari penelitian ini. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai kegiatan seremonial KKN, melainkan sebagai respons berbasis data terhadap kebutuhan riil masyarakat yang telah teridentifikasi melalui tahap wawancara dan observasi sebelumnya.

1. Dasar Perancangan Materi Seminar

Materi seminar disusun dengan merujuk pada panduan edukasi Waspada Investasi dan literasi keuangan digital yang dikembangkan oleh OJK, publikasi edukatif Bank Indonesia mengenai keamanan sistem pembayaran QRIS, serta prinsip pengendalian internal dan manajemen risiko kecurangan (fraud risk management) sebagaimana diatur dalam standar audit yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IKAP). Meskipun standar audit tersebut pada dasarnya ditujukan bagi entitas bisnis dan kantor akuntan publik, prinsip dasarnya mengenai pengendalian internal, pemisahan tugas, verifikasi berlapis, serta pengenalan pola kecurangan (fraud triangle: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi) diadaptasikan secara sederhana untuk membekali pelaku

UMKM dengan kerangka berpikir dalam mengenali potensi kecurangan transaksi, misalnya dengan membiasakan verifikasi ganda notifikasi pembayaran sebelum menyerahkan barang.

Materi seminar disusun dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual dengan kondisi warga desa, mencakup empat pokok bahasan utama: (1) pengenalan modus-modus penipuan digital yang umum terjadi di Indonesia secara umum tanpa merinci teknis eksploitasi yang dapat disalahgunakan; (2) cara memverifikasi keberhasilan transaksi QRIS secara benar, termasuk memastikan notifikasi berasal dari aplikasi resmi; (3) langkah-langkah aman bertransaksi digital, seperti tidak membagikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun; dan (4) saluran pengaduan resmi apabila mengalami dugaan penipuan, termasuk kontak layanan konsumen OJK dan kepolisian setempat.

2. Pelaksanaan dan Sasaran Seminar

Seminar dilaksanakan di balai desa dengan melibatkan perangkat desa, pelaku UMKM, ibu-ibu rumah tangga, dan kelompok pemuda sebagai peserta utama, dengan mempertimbangkan bahwa kelompok pemuda dapat berperan sebagai agen penyalur informasi (change agent) kepada anggota keluarga lainnya, sejalan dengan prinsip agen perubahan dalam teori difusi inovasi Rogers. Metode penyampaian menggabungkan ceramah interaktif, simulasi praktik pemindaian dan verifikasi QRIS menggunakan telepon pintar, serta sesi tanya jawab dan diskusi kelompok agar warga dapat menyampaikan kekhawatiran dan pengalaman pribadi secara terbuka.

Selain aspek edukatif, seminar ini juga dirancang untuk membangun kepercayaan (trust building) melalui kehadiran narasumber yang kredibel dan pendampingan langsung oleh mahasiswa KKN yang telah dikenal warga selama masa penempatan, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah diterima dibandingkan jika disampaikan oleh pihak yang sama sekali baru. Pendekatan berbasis relasi personal ini sengaja dipilih untuk menjembatani hambatan kepercayaan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

3. Hasil Awal dan Respons Peserta

Meskipun evaluasi dampak jangka panjang memerlukan penelitian lanjutan, observasi langsung pasca-seminar menunjukkan indikasi perubahan sikap yang positif. Sejumlah peserta yang sebelumnya menyatakan tidak berminat menggunakan QRIS mulai menunjukkan

keterbukaan untuk mencoba, khususnya setelah memahami cara memverifikasi notifikasi transaksi secara mandiri. Beberapa pelaku UMKM juga meminta pendampingan lanjutan secara personal kepada mahasiswa KKN untuk mengaktifkan kembali barcode QRIS yang selama ini tidak digunakan. Respons ini menunjukkan bahwa hambatan adopsi QRIS di Desa Merek bersifat dapat diintervensi (addressable) melalui edukasi yang tepat sasaran, bukan hambatan struktural yang permanen.

E. Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Digital Inklusif di Desa Merek

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi pengembangan ekonomi digital yang inklusif di wilayah pedesaan. Pertama, perluasan jumlah merchant QRIS semata tidak akan efektif tanpa disertai program literasi dan pendampingan berkelanjutan yang menyasar langsung kekhawatiran psikologis masyarakat, khususnya rasa takut akan penipuan. Kedua, pendekatan edukasi keuangan digital di wilayah pedesaan perlu memperhatikan dimensi budaya lokal, dengan memanfaatkan relasi sosial dan figur tepercaya dalam masyarakat, alih-alih hanya mengandalkan sosialisasi formal satu arah.

Ketiga, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan digitalisasi pembayaran di tingkat desa. Bank Indonesia dan OJK memiliki peran strategis dalam menyediakan materi edukasi dan pengawasan sistem, pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi ruang dan mobilisasi warga, sedangkan perguruan tinggi melalui program KKN dapat berperan sebagai jembatan penghubung yang membawa pengetahuan formal ke dalam bahasa dan konteks yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat desa. Model kolaborasi semacam ini sejalan dengan prinsip Teori Difusi Inovasi Rogers mengenai pentingnya saluran komunikasi interpersonal dalam mempercepat proses adopsi inovasi pada masyarakat dengan tingkat keterbukaan yang beragam.

Keempat, dari perspektif ekonomi syariah, keamanan dan kejelasan transaksi (gharar yang minimal) merupakan prinsip penting yang perlu ditekankan dalam edukasi digitalisasi pembayaran, mengingat latar belakang keilmuan tim penulis pada Program Studi Perbankan Syariah. Penekanan bahwa QRIS yang digunakan secara benar justru dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi dibandingkan uang tunai, sejalan dengan semangat menghindarkan transaksi dari unsur ketidakjelasan, dapat menjadi pendekatan tambahan yang

relevan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap transformasi digital secara lebih bermakna.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat terhadap transaksi tunai di tengah ketersediaan QRIS terutama disebabkan oleh dua faktor dominan, yaitu kekhawatiran menjadi korban penipuan digital (fraud anxiety) dan minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme teknis QRIS. Masyarakat Desa Merek sesungguhnya tidak sepenuhnya asing dengan transformasi digital secara umum, namun penerimaan mereka terhadap transaksi keuangan digital jauh lebih selektif dan hati-hati dibandingkan penggunaan teknologi digital untuk komunikasi maupun hiburan, karena menyangkut risiko finansial yang dirasakan secara langsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan adopsi QRIS bersifat multidimensi, mencakup hambatan budaya berupa kuatnya tradisi transaksi tatap muka dan kepercayaan berbasis relasi personal; hambatan teknis berupa keterbatasan sinyal, perangkat, dan pendampingan pascapemasangan; serta hambatan kepercayaan yang menjadi simpul penghubung antara keduanya. Ketiga dimensi hambatan tersebut saling memperkuat dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan perluasan jumlah merchant, melainkan memerlukan intervensi edukatif yang berkelanjutan dan kontekstual.

Sebagai respons atas temuan tersebut, tim KKN menyelenggarakan Seminar Anti-Scam dan Penipuan Digital yang dirancang berdasarkan kebutuhan riil warga, dengan materi yang diadaptasi dari prinsip edukasi keuangan OJK, publikasi keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia, serta prinsip pengendalian internal dalam standar audit IKAP yang disederhanakan agar relevan bagi pelaku UMKM. Observasi awal menunjukkan indikasi perubahan sikap yang positif pascaseminar, meskipun evaluasi dampak jangka panjang memerlukan kajian lanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi berkelanjutan antara Bank Indonesia, OJK, pemerintah desa, dan perguruan tinggi dalam merancang program literasi keuangan digital yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, tetapi juga pada penguatan kepercayaan

masyarakat terhadap keamanan transaksi digital, sehingga transformasi digital di wilayah pedesaan dapat berjalan secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah lanjutan. Pertama, bagi Bank Indonesia dan OJK, perlu diperkuat program edukasi keuangan digital yang secara khusus menyasar wilayah pedesaan dengan pendekatan partisipatif, bukan hanya sosialisasi satu arah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan mahasiswa KKN sebagai mitra penyampai informasi. Kedua, bagi pemerintah desa, perlu disediakan ruang dan dukungan berkelanjutan bagi kegiatan pendampingan literasi digital bagi UMKM, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti titik akses internet di area pasar. Ketiga, bagi perguruan tinggi, model penelitian berbasis KKN yang menghasilkan luaran edukatif nyata seperti seminar anti-scam ini dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat berkelanjutan, dengan evaluasi dampak jangka panjang pada periode KKN berikutnya. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian kuantitatif lanjutan guna mengukur secara terukur perubahan tingkat penggunaan QRIS pascaintervensi edukasi, sehingga efektivitas program dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 25(1), 58–70.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik & Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024. Jakarta: BPS & OJK.

Bank Indonesia. (2019). Peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional sistem pembayaran berbasis QR Code. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2024). Laporan perkembangan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah triwulan IV 2024. Jakarta: Bank Indonesia.

Fadhilah, R., & Nasution, A. (2023). Persepsi masyarakat pedesaan terhadap adopsi teknologi pembayaran digital. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 112–126.

Hidayanti, N., & Fauzan, R. (2023). Trust dan intensi penggunaan dompet digital: Studi pada generasi milenial. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 12(1), 45–58.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Profesional Akuntan Publik: Standar audit tentang pengendalian internal dan manajemen risiko kecurangan. Jakarta: IKAP.

Maulida, S., & Rachman, T. (2022). Perceived risk dan kesiapan UMKM mengadopsi QRIS di wilayah semi-perkotaan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(3), 301–315.

Nasution, M. I., & Siregar, H. (2022). Literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan digital pada masyarakat pedesaan Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(1), 33–47.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Pedoman edukasi Waspada Investasi dan pencegahan penipuan berkedok layanan keuangan digital. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024. Jakarta: OJK.

Pratama, A. D., & Wulandari, S. (2024). Kesenjangan digital dan pola adopsi pembayaran nontunai pada masyarakat desa di kawasan dataran tinggi. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 8(2), 89–101.

Ramadhani, F., & Kurniawan, D. (2023). Penerapan Technology Acceptance Model dalam menganalisis niat penggunaan QRIS pada pedagang kaki lima. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, 15(2), 154–168.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.

Sari, D. P., & Anggraini, W. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi preferensi transaksi tunai pada masyarakat kelas menengah bawah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(2), 201–214.

Septiana, W., & Hakim, L. (2025). Efektivitas program literasi keuangan digital berbasis komunitas dalam meningkatkan kepercayaan terhadap QRIS. Jurnal Inklusi Keuangan dan Pembangunan, 3(1), 15–29.

Sugiarti, L., & Ramadhan, F. (2022). Metode penelitian kualitatif dalam kajian ekonomi dan sosial (edisi revisi). Bandung: Alfabeta.

Syahputra, R., & Lubis, N. (2026). Kepercayaan digital dan keamanan siber sebagai prasyarat inklusi keuangan pedesaan pascapandemi. Jurnal Keuangan dan Perbankan Digital, 4(1), 22–38.

Yuliana, R., & Prasetya, B. (2022). Difusi inovasi teknologi finansial pada masyarakat pedesaan: Tinjauan teori Rogers. Jurnal Komunikasi dan Pembangunan, 20(1), 77–90.